



Judul : Komisi XI: Genjot Penerimaan Pajak
Tanggal : Minggu, 15 Agustus 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Agar Utang Tak Jadi Beban Komisi XI: Genjot Penerimaan Pajak

ANGGOTA Komisi XI DPR Heri Gunawan mengingatkan pemerintah lebih bijak mengelola pembiayaan negara dari sektor utang. Dia tidak ingin problem utang negara kemudian menjadi persoalan di masa yang akan datang.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) tengah merencanakan dan mencari tambahan utang baru sebesar Rp 515,1 triliun. Tercatat, utang Indonesia bertambah Rp 1.226,8 triliun selama tahun 2020 dan bertambah Rp 1.177,4 triliun selama Januari hingga penghujung Juni 2021.

Dengan demikian, total utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 6.554,56 triliun per Juni 2021 dan berpotensi naik kembali jika penambahan utang Rp 515,1 triliun yang sedang dicari Menkeu tersebut direalisasikan.

Agar problem utang ini tidak menjadi beban, dia menyarankan pemerintah segera menaikkan penerimaan negara, baik dari perpajakan, maupun PNPB atau pendapatan negara bukan pajak. Apalagi problem yang dirasakan saat ini akibat *tax ratio* yang semakin menurun di mana 12 tahun berturut-turut terjadi *shortfall*.

Hal itu, lanjutnya, perlu diatasi dengan memperluas basis perpajakan dan meningkatkan intensifikasi serta ekstensifikasi perpajakan.

"Namun dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabel, dan tidak membebankan rakyat kecil," tegas Heri.

Dia mengingatkan, kemiskinan juga merupakan salah satu persoalan yang harus dituntaskan pemerintah. Data menunjukkan kemiskinan mencapai 27,54 juta orang, pengangguran 8,75 juta orang,

dan ketimpangan pendapatan yang dicerminkan dari rasio gini 0,384. Persoalan tersebut harus diatasi dengan meningkatkan program padat karya dan bantuan sosial.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi I DPR Syarif Hasan. Menurutnya, pengelolaan utang luar negeri selama masa pandemi Covid-19 semakin memprihatinkan. Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri Indonesia semakin jauh melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara, laju penyebaran Covid-19 juga semakin sulit dikendalikan dan berpengaruh terhadap ekonomi.

"Rasio utang terhadap PDB juga membengkak mendekati 41,35 persen dan berpotensi gagal bayar," tutur Syarif.

Syarief menyebut, pemerintah hari ini adalah pemerintah yang paling banyak menambah utang. Dia lalu membandingkan era di masa Pemerintahan Soeharto, penambahannya hanya sebesar Rp 551,4 triliun, lalu di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang masih terkendali dengan penambahan sebesar Rp 1.310 triliun.

"Kini, di masa Pemerintahan Jokowi, penambahannya sudah mencapai Rp 3.946 triliun hanya dalam waktu kurang lebih tujuh tahun, dan masih berpotensi terus bertambah. Ini berbahaya jika tidak segera direm," ungkap Syarif.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah terkait rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah mencapai 41,35 persen. Jika bertambah Rp 515,1 triliun, maka rasionya berpotensi mencapai 42 persen hingga 43 persen. ■ KAL